

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah daerah terhadap Bentor yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan angkutan kota lainya seperti tanpa harus berganti kendaraan penumpang bisa sampai ketujuan dengan tepat waktu. Hal ini terbilang memanjakan para pengguna kendaraan angkutan sehingga masyarakat itu sendiri lebih merasa nyaman dengan adanya bentor ini. Disamping itu, keberadaan bentor juga berperan penting dibidang ekonomi yakni, mengurangi angka pengangguran yang ada. Keberadaan bentor yang tanpa regulasi dan hanya mengandalkan peraturan yang tidak berjalan sesuai payung hukum di atasnya, membuat bentor tidak dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Tidak memiliki payung hukum yang jelas dan bertentangan dengan hukum di atasnya, menjadikan Peraturan Walikota sebagai regulasi penekanan keberadaan bentor tidak berjalan dengan baik.

Kendala utama pemerintah mempertahankan keberadaan bentor yakni protyep, belum adanya kendaraan angkutan handal yang dapat dijadikan sebagai alat angkutan umum di Kota Gorontalo dan pengemudi bentor yang susah diatur serta keberadaan bengkel-bengkel tempat pembuat rumah-rumah bentor yang tidak memiliki izin produksi akan tetapi semua kendala ini akan terselesaikan jika saja masyarakat mau mengikuti usulan dari Kementerian Perhubungan.

5.2 SARAN

Untuk kebijakan pemerintah daerah sebaiknya pemerintah membuat regulasi baru agar mempercepat penekanan angka keberadaan bentor di Kota Gorontalo, Sehingga pengimplemantasiannya dilapangan juga dapat segera terlaksana dengan baik. Adapun yang menjadi faktor utama penetapan kebijakan-kebijakan terhadap bentor ini adalah payung hukum. Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap payung hukum bentor yakni Perda Nomor 6 Tahun 2006 yang substansinya hanya mengatur tentang kontruksi, uji kelayakan, dan pewarnaan terhadap rumah-rumah sesuai domisili pengemudi dan trayek jalan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Gorontalo harus menetapkan beberapa regulasi bru untuk menangani hal tersebut. Adapun isi regulasi untuk menekan pertumbuhan bentor di Kota Gorontalo yakni, (1). Pembatasan atau pemberhentian produksi rumah-rumah bentor (2). Penetapan pajak bentor yang nilainya lebih tinggi dari kendaraan bermotor umum, (3). Ketetapan terhadap aspek keselamatan penumpang. Terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah masyarakat pun harus menaati apa yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah daerah sehingga apa yang diprogramkan yang berhubungan dengan kendaraan bentor tidak ada yang merasa dirugikan.

Kendala dalam hal mempertahankan, menurut peneliti akan terlihat nanti jika regulasi dari kebijakan pemerintah daerah telah dibuat dan direalisasikan dilapangan dengan baik. Oleh karena itu, dalam menanggapi kendala ini sebaiknya pemerintah daerah secepatnya mengambil keputusan menggunakan usulan dari kementerian perhubungan atau menghilangkan keberadaan bentor secara perlahan-lahan dengan menghentikan izin produk rumah-rumah bentor dan menentukan pajak untuk bentor yang

nilainya diatas pajak kendaraan bermotor umumnya, sehingga dengan sendirinya keberadaan bentor akan berkurang, seiring program pemerintah yang menghidupkan kembali kendaraan angkutan umum dan hulontalo sekarang ini.